

Zulfadhli Belum Kembalikan Mobil Dinas

PONTIANAK. Kendaraan dinas operasional Ketua DPRD Kalbar periode 2004-2009 belum dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Kendaraan jenis sedan Toyota Camry 2400 AT itu sampai saat ini masih di tangan Mantan Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli.

Bahkan berulang kali Sekretaris DPRD Kalbar melayangkan surat kepada legislator Partai Golkar yang kini duduk

di DPR RI tersebut. Namun tidak digubris. "Kita sudah berulang kali menyurati yang bersangkutan dan meminta agar mobil tersebut dikembalikan. Apalagi masalah ini menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemprov 2010," ungkap Bambang Soerachmat SH, Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar kepada

wartawan, Senin (19/9).

Menyikapi hal ini, Bambang menambahkan, pihaknya sudah menyurati Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalbar pada 8 September 2011. Tujuannya menyampaikan konfirmasi atas temuan BPK tersebut.

Berdasarkan arsip di Sekretariat DPRD, Bambang menjelaskan, Zulfadhli saat menjabat sebagai Ketua DPRD

pernah menyurati pemerintah provinsi pada 3 September 2009 silam. Dalam surat itu, Zulfadhli menyampaikan permohonan hibah/pinjam pakai kendaraan, karena merasa masih memerlukan kendaraan tersebut pasca-memangku jabatan Pimpinan DPRD Kalbar.

Namun permintaan Zulfadhli ditolak Pemprov melalui surat Plt Sekretaris

■ Halaman 7

Zulfadhli Belum dari halaman 1

Daerah Kalbar, MH Munsin, tertanggal 3 April 2010. Dalam surat itu, Pemprov menyatakan, dengan berakhirnya masa bakti pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD maupun kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Anggota DPRD harus dikembalikan kepada Pemda Cq Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/barang, paling lambat satu bulan sejak tanggal pemberhentian. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 024/3341/SJ.

Bambang menambahkan, sebelumnya Sekretaris DPRD juga sudah menyurati Zulfadhli pada 1 Oktober 2009 (Nomor 028/369/Set.DPRD-A). Dalam surat ini, Sekretaris DPRD meminta agar yang bersangkutan mengembalikan kendaraan dinas operasional pimpinan DPRD tersebut.

Kemudian, dia melanjutkan, surat pemberitahuan kedua dilayangkan pada 29 Oktober 2009 dengan nomor surat 028/490/Set.DPRD-A. Surat terakhir dilayangkan pada 28 April 2010 tentang penarikan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD periode 2004-2009.

Dalam surat itu diterangkan, kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD

itu sudah tidak memiliki nomor polisi. Sebab, nomor polisi KB 4 sekarang terdaftar dan dipergunakan atas nama kendaraan Ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalbar, Christianus Lumano membenarkan, masalah ini menjadi salah satu catatan dalam pemeriksaan BPK. "Sekarang masalah itu masih ditangani oleh SKPD, Sekretariat DPRD. Kalau tidak sanggup, baru nanti akan ditangani oleh BPKAD," jelasnya singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Mantan Ketua DPRD Kalbar Ir Zulfadhli menjelaskan, persoalan mobil dinas ini sudah berlangsung lama. Ia juga mengakui bahwa Pemprov melalui Sekretaris Daerah pernah menyurati dirinya dan meminta mobil tersebut dikembalikan. "Tetapi saya sebelumnya sudah menyurati Pemprov memohon peminjaman mobil itu.

Suratnya resmi lho," kata dia. Zulfadhli menegaskan, mobil tersebut masih diperlukannya untuk mendukung tugas-tugas, karena dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI yang mewakili Kalbar. Mobil itu digunakan saat kunjungan lapangan ke daerah-daerah di Kalbar ketika masa reses. "Apa itu salah. Saya mewakili ma-

syarakat Kalbar juga. Kecuali kalau saya tidak lagi bertugas untuk kepentingan Kalbar," sesalnya.

Karena itu, Zulfadhli meminta kepada pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan kembali permohonan pinjam pakai yang pernah disampaikan sebelumnya. Zulfadhli juga meminta pemerintah provinsi bersikap bijaksana dan dapat memberi kesempatan kepadanya untuk memakai mobil tersebut.

"Saya tahu mobil itu bukan milik saya. Itu aset Pemprov. Tetapi apakah Pemprov sudah perlu benar dengan mobil itu, sehingga tanpa mobil itu pelayanan publik jadi terganggu. Bukankah pimpinan DPRD sekarang masing-masing sudah punya mobil. Kalau memang Pemprov perlu benar untuk pelayanan publik, dan ngotot ingin menariknya secara paksa, saya akan kembalikan," tegas Zulfadhli.

Jika memang akan ada upaya penarikan paksa, Zulfadhli meminta agar Pemprov dapat berlaku adil. Sebab, selama ini ia melihat banyak kendaraan dan aset Pemprov lain yang masih dikuasai mantan pejabat dan belum dikembalikan. "Kalau mau ditarik paksa, saya minta keadilan. Mengapa hanya kepada saya saja yang ngotot," kesal Zulfadhli. (jul)